Konsorsium PERMAMPU

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra Otonom Atas Tubuhnya, Sehat dan Kreatif

Newsletter II
Juli - Desember 2015



h.7
FKPAR



h.14
FMS

h.22
Cerita
Perubahan



GERAKAN PEREMPUAN AKAR RUMPUT DAN TANGGUNG GUGAT PROGRAM

Sentuhan program MAMPU mulai terlihat pada penerima manfaat, antara lain bertumbuhnya inisiatif untuk mengubah kebijakan kabupaten/kota yang berpihak pada Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi/HKSR Perempuan. Ini dapat dilihat dengan menguatnya 117 kelompok perempuan akar rumput di desa-desa dampingan program Permampu di 8 propinsi di Sumatera.

Kehadiran mitra baru, dan aktifnya para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Akademisi dan Media di semua wilayah kerja Permampu telah mencapai 3.360 orang. Kegiatan program yang terorganisir untuk Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput/FKPAR dan Forum Multi Stakeholder/FMS serta pengelolaan simpan pinjam kelompok perempuan akar rumput sudah mencapai Rp. 23.871.580.941,- yang dikelola di 348 kelompok. Ini menjadi penanda untuk mencapai penguatan ekonomi yang menjadi strategi pencapaian tujuan program MAMPU.

Meluas dan bertumbuhnya kemampuan perempuan akar rumput untuk membangun dasar perekonomian di tingkat rumah tangga dan mikro dengan sistem simpan pinjam, menjadi alat penguatan, pengikat, sekaligus alat untuk menjawab persoalan keseharian maupun persoalan praktis yang muncul.



Sampai akhir Desember 2015, para multi stakeholder di Banda Aceh, Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar - Sumatera Barat dan Kota Bengkulu telah menyepakati untuk dikeluarkannya kebijakan baru terkait HKSR. Tentu proses tersebut merupakan keberhasilan FKPAR bersama Permampu dalam mempengaruhi FMS dan para pemangku kebijakan. Berbagai inisiatif yang berkaitan dengan rancangan kebijakan baru antara lain; Draft Peraturan Walikota Banda Aceh tentang implementasi Qanun Kesehatan Ibu, Balita dan Bayi Baru Lahir (KIBBLA), khususnya pada 6 pasal yang berkaitan dengan isu Kespro, dan Rancangan Peraturan Nagari/Ranpernag untuk Pemenuhan dan Perlindungan HKSR di Kabupaten Tanah Datar merupakan bentuk pengakuan terhadap gerakan perempuan akar rumput.

Bagi Permampu, akuntabilitas kepada publik tidak sekedar sajian penggunaan anggaran, tetapi harus melihat secara kritis bersama para pihak antara capaian program dan alokasi anggaran yang diserap. Permampu tentu akan tetap fokus memastikan negara bertanggung jawab untuk melakukan perubahan kebijakan, sebagai jalan untuk pemenuhan HKSR Perempuan yang merupakan hak dasar perempuan miskin di perkotaan dan di pedesaan. ■

Tety S dan Dina Lt

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra Otonom Atas Tubuhnya, Sehat dan Kreatif

Penanggungjawab	Tety Sumeri	**Kontributor**	Direktur Eksekutif, Koord.Program, Staf Lapang Lembaga Anggota
Sekretaris Redaksi	Sustriana Saragih		
Editor Tulisan	Dina Lumbantobing, Tety Sumeri	**Layout**	Muhamad Reza
Editor Foto	Muhamad Reza	**Distribusi**	Sustriana Saragih

Sekretariat PERMAMPU
Jl.Letjen. Jamin Ginting KM 8 No.282 Padang Bulan, Medan 20141 - Sumatera Utara
Telp/Fax. 061-8361102 I e-mail: konsorsiumpermampu@gmail.com
www.permampu.org I Facebook: PermampuConsortium

Ibu, Bapak dan Kawan-kawan Muda yang baik. Dalam edisi kedua ini, kami menampilkan berbagai upaya perempuan akar rumput yang mulai mengenyam keberhasilan-keberhasilan kecil. Edisi kedua ini, bagaikan lembaran ringkas yang mencatat perubahan dan menguatnya dukungan para multi stakeholder akan perjuangan perempuan akar rumput dalam menyuarakan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi/HKSR Perempuan. Keberhasilan kecil itu terlihat di semua wilayah dampingan program Permampu di delapan propinsi di Sumatera.

Telah mulai berkembang dan meluas kelompok ekonomi perempuan, yang diawali dengan aktivitas simpan-pinjam. Seiring dengan itu, mitra-mitra baru dan dukungan dari Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Akademisi menjadi penyemangat untuk terus bergerak melakukan perubahan.

Di beberapa tempat, perempuan akar rumput telah mampu menghantarkan kesepakatan untuk rancangan kebijakan baru yang mendukung pemenuhan HKSR Perempuan. Dinamika ekonomi politik lokal dan nasional pasti akan selalu melingkupi gerakan perempuan akar rumput ini. Untuk itu, semangat untuk terus memperluas gerakan dan dukungan dari para pihak tentu akan menjadi agenda utama Permampu.

Selamat Membaca !

Tety Sumeri

Daftar Isi

1 Editorial
2 Salam Redaksi
3 Akuntabilitas
7 FKPAR
14 FMS
22 Cerita Perubahan
26 Liputan Media PERMAMPU

MAMPU
Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan

Konsorsium PERMAMPU

Australian Aid

Capaian PERMAMPU Juli - Desember 2015

Oleh : Dina Lumbantobing
Koordinator Tim Kerja Permampu

Tujuan & Cakupan Program

Sebagaimana telah dimuat dalam newsletter sebelumnya, tujuan dari program ini adalah agar perempuan pedesaan, perempuan miskin dan perempuan muda di 29 kabupaten di pulau Sumatera; diharapkan bisa menikmati, dihormati, dilindungi Hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi/HKSR mereka. Program ini dilaksanakan oleh 8 LSM Perempuan di 8 propinsi di Pulau Sumatera.

Manajemen Permampu

Dalam semester II tahun 2015 ini, Permampu belajar untuk penguatan kapasitas para personil dan menunjukkan komitmennya untuk semakin menguatkan jaringannya, sbb :

- **Tim Kerja yang diwakili Dina Lumbantobing** menghadiri Festival Forum Kawasan Timur Indonesia (Forum KTI) yang ke VII di Makassar pada 17-18 November 2015. Forum ini diselenggarakan oleh BAKTI, yaitu salah satu mitra MAMPU di Indonesia Timur. Tujuan utama dari Pertemuan Forum KTI adalah untuk **berbagi pengalaman dalam menciptakan perubahan positif serta solusi cerdas dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan Kawasan Timur Indonesia.**
- **Permampu yang diwakili oleh Yeni Roslaini (Dir. WCC Palembang) dan Sustriana Saragih (Asisten Tim Kerja)** mengikuti Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia di Jember pada 23-25 November 2015. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Migrant CARE yang merupakan mitra Mampu, bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Universitas Negeri Jember (UNEJ), dengan tema "Negara Hadir Buruh Migran Terlindungi ".
- Anggota Permampu memperoleh pendidikan mengenai manajemen keuangan melalui **Pertemuan Koordinasi untuk Sosialisasi Aturan Anggaran Program PERMAMPU Periode 2016-2019** pada tanggal 13 – 16 Desember 2015, di Hotel Horison, Pematang Siantar.
- Seluruh direktur dan personil pengelola data Permampu memperoleh penguatan kapasitas mengenai baseline data di Pematang Siantar pada tanggal 9 – 10 Desember.
- Permampu juga berhasil menyelesaikan desain program 4 tahun, untuk periode 2016 sampai 2019 akhir.

Program Berjalan & Jaringan Menguat

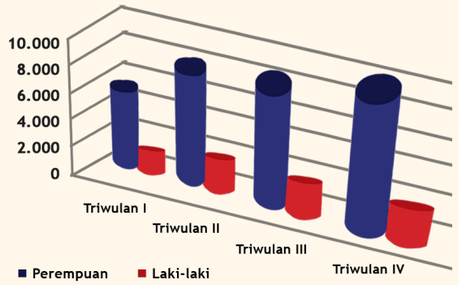
- **Lokakarya Pemuka Agama** yang diselenggarakan di Banda Aceh 8 Desember 2015, dihadiri oleh 49 peserta (19 laki-laki & 30 perempuan) terdiri dari 12 Pemuka Agama Aceh (7 prp & 5 lk), 4 dari luar Aceh (laki-laki dari SUMUT, Lampung, Riau dan Jambi), dengan pembicara: UIN Banda Aceh, Institute Fahmina, Rumah Kitab dan Aisyiah. Lokakarya ini sedikit banyak membuka pikiran para Tokoh Agama mengenai pentingnya perlindungan HKSR Perempuan dengan mendasarkan diri pada perlindungan perempuan sebagai bagian dari umat dan warga Negara Indonesia. Direkomendasikan untuk melakukan pendidikan bagi para Tokoh Agama di 8 propinsi secara bertahap untuk memastikan perspektif berbasis hak berkembang di kalangan Tokoh Agama.
- **Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput/ FKPAR** dari delapan Propinsi melaksanakan Peringatan Hari Anti Kemiskinan dan Perempuan Pedesaan pada tanggal 16 & 17 Oktober 2015 di Banda Aceh. Kegiatan ini mencakup peninjauan kembali Rencana Kerja FKPAR, peningkatan kapasitas dan dialog dengan pemerintah (BAPPENAS, DINSOS, DPRD, dll).

- **Para suami/ayah telah semakin dijangkau,** seperti para suami/ayah dari anggota Kesatuan Lampung Utara secara aktif terlibat dalam sosialisasi dan layanan MOP/KB Laki-laki yang bertema "Tunjukan Lakimu, Gunakan Alat Kontrasepsimu" dan 13 dari 30 orang yang hadir dalam kegiatan tersebut memutuskan untuk vasektomi. Para suami/ayah dari Jambi yang merupakan dampingan APM mengikuti lomba materi KDRT dan Pola Asuh dalam Jambore PKK tingkat Kabupaten Merangin.
- **Konsorsium juga secara aktif merangkul mitra lain** seperti Aisyiah, membentuk Forum Jurnalis Perempuan Sumatera Selatan untuk Pemenuhan HKSR di Sumatera Selatan (WCC Palembang) dan Bengkulu (Cahaya Perempuan WCC).

Jangkauan Stakeholder & Pengorganisasian

- Jumlah penerima manfaat pada semester ini meningkat; dimana jumlah penerima manfaat adalah 9.077 perempuan dan 2.201 laki-laki, serta 153.477 orang data tidak terpilah. Peningkatan jumlah penerima manfaat ini menutup tahun 2015 dengan cukup membanggakan.

Perbandingan Jumlah Penerima Manfaat



- Kelompok simpan pinjam yang merupakan salah satu fondasi penguatan ekonomi telah semakin berkembang, dimana sampai akhir 2015 terdapat 348 kelompok dengan total tabungan sebesar **Rp. 23,871,580,941,-** (tabel 1)
- Konsorsium Permampu **berhasil membentuk 56 kelompok baru dengan jumlah anggota perempuan 1.216 orang dan laki-laki 116 orang serta memperkuat dan mengembangkan 61 kelompok yang sudah ada dengan jumlah anggota perempuan 1.958 orang dan laki-laki 7 orang.** Dari kelompok yang baru terbentuk tersebut, 16 kelompok adalah kelompok perempuan basis di pedesaan dan miskin kota (271 orang) dan 22 kelompok PIK-R (565 perempuan dan 112 laki-laki).

Lembaga	Jumlah Kel. Simpan Pinjam	Jumlah Tabungan/ Saham
Flower Aceh	10	9,102,000.00
Pesada SUMUT	239	21,095,060,941.00
PPSW Sumatera-Riau	64	2,434,527,000.00
LP2M SUMBAR	16	97,848,000.00
APM Jambi	4	152,017,000.00
Cahaya Perempuan WCC Bengkulu	4	8,008,000.00
WCC Palembang SUMSEL	3	16,197,000.00
DAMAR Lampung	8	58,821,000.00
Total	**348**	**23,871,580,941.00**

tabel 1

- Jumlah stakeholder yang mampu dirangkul oleh Permampu juga mengalami peningkatan, antara lain Tokoh Adat (198 orang), Tokoh Agama (364 orang), PEMBATRA (120 orang), Instansi Kesehatan (Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Badan PP/KB, Bidan, Perawat, Pustu, Posyandu, Polindes) (459 orang), Instansi Pendidik (Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Siswa, dan OSIS) (1.834 orang), dan Instansi Pemerintah (DPRD, BPD, Pengadilan Agama, Polres/Kadit PPA, dan P2TP2A) (285 orang).

Selain itu, Permampu juga melibatkan media (102 orang), Akademisi (42 orang), Ormas/LSM (91), para suami/ayah (169 orang), dan anggota masyarakat (826 orang) untuk mendukung percepatan pemenuhan HKSR bagi perempuan di seluruh aspek kehidupan perempuan.

Tantangan:

1. Mendidik staf untuk pengelolaan kelompok ekonomi, baik dalam manajemen simpan pinjam; maupun untuk pengembangan usaha (packing, pemasaran, dll).
2. Kesulitan untuk melaksanakan kegiatan dengan pihak pemerintah, khususnya di masa PILKADA.
3. Kecenderungan membuat Forum Multi Stakeholder/FMS sebagai kelompok berbadan hukum dengan struktur yang berada di dalam pemerintah desa ataupun kabupaten. ■

Akuntabilitas

Laporan Realisasi Anggaran PERMAMPU 2015

Posisi Desember 2015

Dana Masuk			
42-1001-0001	Hibah Program PERMAMPU		16,360,932,587
42-1001-0002	Bunga Bank – PERMAMPU		50,374,098
	Total		16,411,306,685
Biaya		**Anggaran**	**Realisasi**
52-1001-0001	I. MANAGEMENT – PERMAMPU		
52-1001-0002	1.1 Honorarium – PERMAMPU	824,547,500	824,547,500.00
52-1001-0003	1.2 Office operational – PERMAMPU	104,000,000	98,715,493.00
52-1001-0004	1.3 Procurement -- PERMAMPU	31,000,000	36,265,000.00
52-1001-0005	II. PROGRAM – PERMAMPU		
52-1001-0006	2.1 Review enam bulanan (2 per lembaga) – PERMAMPU	103,807,500	103,807,500.00
52-1001-0007	2.2 Rapat koordinasi para Direktur – PERMAMPU	93,044,310	93,044,310.00
52-1001-0008	2.3 Capacity building untuk anggota	50,755,400	50,755,400.00
52-1001-0009	2.4 Pertemuan jaringan nasional dan internasi	47,600,000	30,778,331.00
52-1001-0010	2.5 Monitoring 3 bulanan ke setiap anggota	44,876,641	45,851,641.00
52-1001-0011	2.6 Training audit partisipatif – PERMAMPU	41,694,480	41,694,480.00
52-1001-0012	2.7 Collective action – PERMAMPU	699,838,641	699,838,641.00
52-1001-0013	2.8 Printing buletin – PERMAMPU	30,000,000	27,000,000.00
52-1001-0031	2.9 Rapat Koordinasi Keuangan—PERMAMPU	79,900,000	78,396,700.00
52-1001-0032	2.10 Asistensi sesuai kebutuhan – PERMAMPU	5,462,200	5,462,200.00
52-1001-0033	2.11 Training Manajemen Keuangan untuk Non Keu	84,503,080	84,503,080.00
52-1001-0034	2.12 Training Advokasi kreatif	99,050,000	103,897,390.00
52-1001-0035	2.13. Training Database	83,750,000	69,177,550.00
52-1001-0036	2.14 Diskusi dengan kelompok perempuat dengan candidat	498,092,323	129,374,450.00
52-1001-0037	2.15 Diskusi Publik Dampak Asap terhadap Kesehatan	37,327,925	36,860,000.00
52-1001-0038	2.16 Diskusi Pemuka Agama	70,350,000	82,372,900.00
52-1001-0039	2.17 Audit Internal ke PPSW	20,400,000	15,083,350.00
52-1001-0014	III. KEGIATAN ANGGOTA – PERMAMPU		
52-1001-0015	3.1 PENGORGANISASIAN – PERMAMPU	4,792,434,399	4,460,159,661.00
52-1001-0016	3.2 Inovasi – PERMAMPU	258,220,000	113,339,000.00
52-1001-0017	3.3 Advokasi masyarakat adat – PERMAMPU	431,390,000	349,168,700.00
52-1001-0018	3.4 Advokasi negara – PERMAMPU	764,665,000	335,050,175.00
52-1001-0019	3.5 Advokasi institusi pendidikan – PERMAMPU	617,033,750	338,637,225.00
52-1001-0020	3.6 Advokasi institusi agama dan tokoh agama	645,995,000	345,705,650.00
52-1001-0021	3.7 Networking & learning – PERMAMPU	709,860,000	730,031,875.00
52-1001-0022	3.8 Capacity building & knowledge management	814,415,000	804,298,917.00
52-1001-0023	3.9 Monitoring dan evaluasi – PERMAMPU	436,310,000	363,278,185.00
52-1001-0024	3.10 Management dan Operational – PERMAMPU		
52-1001-0025	3.10.1 Honorarium – PERMAMPU	1,926,554,000	1,748,354,250.00
52-1001-0026	3.10.2 Operational cost- PERMAMPU	760,741,000	647,858,024.00
52-1001-0027	3.10.3. Procurement – PERMAMPU	320,450,000	385,582,050.00
52-1001-0028	3.11. Corefund – PERMAMPU	1,698,445,744	1,293,714,962.00
52-1001-0029	Pajak bank – PERMAMPU		10,074,819.00
52-1001-0030	Adm bank – PERMAMPU		
	Total	**17,226,513,893**	**14,572,604,590.00**

Forum Komunitas
Perempuan Akar Rumput



Membagikan Pengalaman, Menguatkan Gerakan

⌘ FKPAR PROPINSI ACEH

Tindak lanjut dari pertemuan dan Pembentukan FKPAR di Propinsi Aceh oleh mitra MAMPU di Aceh dilakukan melalui sharing hasil pertemuan dan Rencana Tindak Lanjut/RTL FKPAR tingkat Propinsi dan Sumatera kepada anggota kelompok dampingan melalui diskusi regular di masing-masing desa.

Pelibatan mitra MAMPU dan PEDULI, Pengurus FKPAR, diantaranya pada pertemuan hearing/audiensi dengan SKPD di Aceh Utara, FMS Kabupaten Aceh Utara, Banda Aceh dan Pidie, roadshow media dengan Jurnalis/media: Serambi Indonesia, Potret dan Radio OZ Aceh, AJI dan PWI Kabupaten Aceh Utara, serta PWI Kabupaten Pidie.

Di akhir September, juga dilakukan pertemuan evaluasi tentang realisasi RTL FKPAR Propinsi Aceh yang melibatkan mitra MAMPU di Aceh (Flower Aceh, Pekka Aceh dan KPI Aceh). Dan puncaknya perayaan Hari Internasional Perempuan Pedesaan dan Pemberantasan Kemiskinan FKPAR Sumatera yang dilaksanakan di Aceh dengan menghadirkan 98 peserta yang merupakan anggota kelompok dampingan mitra MAMPU di Pulau Sumatera. ■



Dok. Flower Aceh

⌘ MENGENAL LEBIH DEKAT FKPAR SUMATERA UTARA

Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini tahun 2015, 61 perempuan yang merupakan perwakilan dari 38 desa/kelurahan dan 17.764 orang perempuan dari kelompok-kelompok perempuan dampingan LSM Mitra MAMPU di Sumatera Utara bersepakat membentuk FKPAR Sumatera Utara untuk terwujudnya gerakan perempuan akar rumput yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan gender.



Dok. PESADA

Berasal dari 20 kabupaten/kota yaitu Kotamadya Medan, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Gunung Sitoli, dan Kotamadya Sibolga. Lalu Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Utara, Asahan, Langkat, Samosir, Humbang Hasundutan, Nias Induk, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Adapun misi yang dilakukan diantaranya; pendidikan kesadaran kritis bagi anggota, advokasi kebijakan, serta membangun hubungan dengan tokoh agama, tokoh adat dan berbagai pemangku kepentingan untuk advokasi aturan, nilai dan

norma yang mendiskriminasi perempuan. Program forum ini untuk memperbaiki dan memberikan kemudahan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial serta memberikan perlindungan hukum dan kehidupan yang layak bagi perempuan pekerja rumahan. Terpenuhi dan terlindunginya hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, khususnya perempuan pedesaan, miskin kota dan remaja, dan tersedianya fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.

Lalu menghapuskan kekerasan seksual dan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan dan memastikan keterlibatan kelompok perempuan dalam Musrembangdes hingga Musrembangkab/kota dan duduk dalam institusi pengambilan keputusan serta melibatkan kelompok perempuan dalam implementasi dan pengawasan UU Desa. ■

⌘ FKPAR PROPINSI RIAU

FKPAR Propinsi Riau terbentuk bertepatan pada Peringatan Hari Kartini, 21 April 2015. Ada 2 mitra yang tergabung di dalam organisasi ini yaitu SPB (Serikat Perempuan Basis) Rokan Hilir (Rohil) dampingan PPSW Sumatra dan Yayasan Embun Pelangi Kepulauan Riau, sub mitra Komnas Perempuan, bersepakat merumuskan nama forum, visi, misi, tujuan, nilai dan susunan pengurus serta Rencana Kerja tahun 2015.



Dok. PPSW Sumatra, Riau

Sepanjang Juli sampai Desember, FKPAR Propinsi Riau turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PPSW Sumatra dan juga di tingkat Permampu., diantaranya Peringatan Hari Kesehatan Seksual Sedunia (HKSS), Workshop Peringatan Hari Internasional Perempuan Pedesaan dan Melawan Kemiskinan serta Semiloka Pendidikan Politik bagi SPB, FMS dan FKPAR. Lalu Dialog dengan Calon Kepala Daerah bertema "Mencari Pemimpin Yang Berperspektif Gender", dan Peringatan Hari Internasional Perempuan Pedesaan & Pemberantasan Kemiskinan.

FKPAR Propinsi Riau juga berperan dalam melakukan perluasan wilayah strategis dan pembentukan kelompok baru serta penyebaran informasi dan diskusi HKSR di kelompok dan masyarakat luas. FKPAR memiliki potensi dalam pendekatan kepada tokoh masyarakat dan Aparatur Desa termasuk pengurus PKK Desa-Kecamatan juga dengan para istri Penghulu/istri Lurah dalam mengadvokasikan kegiatan yang akan diajukan dengan menggunakan Dana Desa.

Beberapa usulan sudah mulai disampaikan kepada Kepala Desa/Penghulu, seperti pelatihan keterampilan daur ulang sampah dan kegiatan olah raga untuk remaja putri di Desa Sungai Sialang, Kecamatan Batu Hampar. Pengurus FKPAR juga diminta untuk menyampaikan materi HKSR di forum PKK Kecamatan.

Ada beberapa kendala yang ditemukan FKPAR di lapangan seperti akses jalan yang sulit ditempuh dan data dari kelompok terkesan kurang diterima oleh pemerintah. Contoh ketika FKPAR melakukan audiensi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir dan menceritakan kasus kematian ibu melahirkan yang terjadi di desanya. Tanggapan Dinas Kesehatan seperti tidak percaya karena mereka tidak menerima berita tersebut dari Puskesmas/RSUD.

Kendala lain adalah sedikitnya jumlah perempuan yang menjadi pejabat pemerintah maupun anggota DPRD dan seringnya mutasi yang ada di pemerintah. Hal ini mempengaruhi kebijakan dan sosialisasi program HKSR. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, FKPAR Riau membuat strategi pendekatan kepada para pihak secara terus-menerus agar pemerintah dapat memenuhi kebutuhan HKSR perempuan. ■

⌘ PERINGATAN 16 HARI AKTIVISME FKPAR SUMBAR

Dalam rangka merayakan 16 Hari Aktivisme, pada tanggal 3 Desember 2015 Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) bersama dengan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumatera Barat mengadakan Dialog Publik bersama dengan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang akan maju pada PILKADA tanggal 9 Desember 2015.

Dengan tema "Membangun Komitmen Pemerintah Daerah untuk Mendukung Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Perempuan/HAP". Dialog ini diharapkan membuka pintu bagi perempuan untuk mengungkapkan ketidakadilan yang dirasakan serta aspirasi untuk mendesak calon pemimpin peduli dengan perempuan dalam pemenuhan dan perlindungan HAP.



Dok. LP2M

Walaupun keinginan untuk bertemu dengan kedua pasangan calon tidak terpenuhi, karena hanya Tim Sukses nomor urut 2 yang datang memenuhi undangan, tidak mengecilkan semangat peserta yang tergabung dalam FKPAR SUMBAR untuk menyampaikan aspirasinya.

Salah satu hasil kegiatan adalah penandatangan kontrak politik oleh Tim Sukses pasangan calon Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc. dan Drs. H. Nasrul Abit, MBA yang berisi;

1. Menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan dan hukum yang mendukung pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Perempuan.
2. Mengimplementasikan falsafah hidup Minangkabau "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" dengan meluruskan penafsiran dan praktek adat dan agama yang sesungguhnya, sebagai upaya mengembalikan peran dan posisi perempuan Minangkabau yang sesungguhnya.
3. Mendukung berbagai kegiatan komunitas perempuan Sumatera Barat untuk memperjuangkan Hak Asasi Perempuan.
4. Pemerintah menjamin perbaikan mutu dan akurasi data kemiskinan di Sumatera Barat.
5. Pemerintah menjamin tersedia paket pendidikan A, B, dan C tanpa berbayar, sehingga perempuan miskin mendapatkan akses paket pendidikan tersebut.
6. Pemerintah menjamin ketersediaan layanan menyeluruh bagi perempuan miskin untuk kesehatan reproduksi khususnya Tes IVA, Papsmear yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan.
7. Pemerintah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan dan menindak tegas pelaku kekerasan khususnya pelaku kekerasan seksual.
8. Pemerintah menjamin akses pekerjaan yang layak bagi perempuan pekerja rumahan.
9. Peningkatan kemandirian pangan dan pengembangan agribisnis berbasis pangan lokal untuk mendorong produk usaha olahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulanan bencana alam yang adil gender.

Membangun komitmen pemerintah dalam bentuk kontrak politik merupakan langkah awal untuk perjuangan FKPAR Sumbar dan akan terus mengawal implementasinya. ■

⌘ FKPAR PROPINSI JAMBI



Dok. APM

Pada tanggal 17-19 Oktober 2015 bertempat di Banda Aceh, FKPAR propinsi Jambi yang terdiri dari pendamping, pengurus, pelaksana dan pengawas mengikuti kegiatan Peringatan Hari Internasional Perempuan Pedesaan & Pemberantasan Kemiskinan Forum Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumatra "PEREMPUAN MELAWAN KEMISKINAN". Peserta dari Merangin yang mengikuti kegiatan ini berbagi informasi dan pengetahuannya selama mengikuti kegiatan tersebut kepada anggota komunitas di forum.

Peserta FKPAR yang berangkat ke Aceh merasakan adanya peningkatan pengetahuan terutama mengenai pendidikan untuk FKPAR dengan berbagai materi diantaranya: Struktur Lembaga Negara Tingkat Desa sampai Nasional, Mengenal Berbagai Kebijakan untuk Advokasi HKSR, Strategi Advokasi Kebijakan melalui Gerakan Perempuan Akar Rumput: Penguatan Gerakan Multi Pihak/FMS, khusus FKPAR dengan Aisyiah & PKK, dan Keterampilan Berkomunikasi.

Materi dan proses diskusi ini sangat berguna sebagai pembekalan untuk melakukan gerakan perempuan akar rumput yang mandiri untuk mendorong kepemimpinan perempuan yang mampu melakukan advokasi dan pemenuhan hak-hak perempuan yang berkeadilan gender di tingkat akar rumput atau komunitas.

Kegiatan lain yang dilakukan oleh FKPAR Propinsi Jambi adalah Pendidikan Pemilih Cerdas. Dalam rangka PILKADA serentak 2015, propinsi Jambi akan melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebagai organisasi perempuan yang memiliki komitmen mewujudkan demokrasi yang lebih baik, FKPAR Jambi mengadakan Pendidikan Pemilih Cerdas dan Berkualitas PILKADA 2015 bagi kadernya pada tanggal 10 November 2015.

Diikuti oleh 45 perempuan yang berasal dari perwakilan 14 kelompok perempuan. Pendidikan ini menjadi harapan untuk mendorong pemilih perempuan tidak mudah terpengaruh dengan adanya provokasi dan pencitraan, serta dapat menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas untuk menentukan nasib masyarakat Jambi ke depan yang berpihak kepada hak-hak perempuan. ■

⌘ FKPAR PROPINSI BENGKULU

FKPAR Propinsi Bengkulu mengikuti kegiatan Peringatan Hari Internasional Perempuan Pedesaan & Pemberantasan Kemiskinan di Aceh, 17-19 Oktober 2015. Perwakilan terlibat aktif dalam kegiatan penguatan kapasitas FKPAR melalui pelatihan dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut/ RTL FKPAR Sumatera.

Dalam rangka peringatan 16 Hari Aktivisme 2015, Cahaya Perempuan WCC, FKPAR Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu mengadakan serangkaian kegiatan di masing-masing wilayah. FKPAR Kabupaten Rejang Lebong melakukan Dialog dengan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada 3 Desember 2015, dengan tema **"Pilih Pemimpin Yang Peka Kebutuhan dan Kepentingan Perempuan"** sebelum PILKADA 2015 untuk Kabupaten Rejang Lebong diselenggarakan.

Kegiatan ini bertujuan mengetahui, dan mengenali calon-calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) periode 2015-2020, mengetahui dan paham tentang visi dan misi Calon Kepala Daerah, terutama terkait isu Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan serta isu Pendidikan bagi perempuan, paham tentang tahapan pelaksanaan dan pengawasan PILKADA.

Peserta kegiatan ini juga diikuti oleh kelompok perempuan lain/Ormas/LSM yaitu Balai Perempuan KPI Cabang Rejang Lebong, Aisyiah, PKBI, IBI, PKK, serta Calon Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam dialog tersebut Calon Kepala Daerah menyampaikan visi & misinya. Dalam kegiatan ini FKPAR melakukan kontrak politik kepada pasangan Calon Kepala Daerah, yang isinya sbb :

- Pemda Kabupaten Rejang Lebong menjamin ketersediaan layanan menyeluruh bagi perempuan miskin untuk kesehatan reproduksi khususnya (IVA, papsmear) yang dibiayai melalui asuransi kesehatan bagi warga miskin.
- Pemda Kabupaten Rejang Lebong menjamin pemenuhan & perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan/kekerasan seksual terutama untuk pelayanan kesehatan reproduksi di puskesmas dan rumah sakit.
- Aparat Penegak Hukum dapat proaktif dalam penegakan hak keadilan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual sesuai UU yang berlaku.



Dok. Cahaya Perempuan WCC

Pada pertemuan FMS Kabupaten Rejang Lebong, FKPAR menyampaikan beberapa usulan mereka, diantarany: agar Puskesmas Kecamatan Selupu Rejang mengembangkan program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja/ PKPR; bahwa ibu-ibu di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu membutuhkan Posyandu yang mudah dijangkau dan jam pelayanannya sesuai dengan waktu yang mereka punya, karena Posyandu yang ada untuk wilayah mereka dipusatkan di Puskemas, dimana jam pelayanan disesuaikan dengan jam kerja petugas Puskesmas.

Sementara ibu-ibu Kelurahan Padang Serai yang bekerja sebagai petani dan padagang keliling tidak memiliki waktu siang dan sore hari, sehingga tidak dapat mengakses layanan lebih baik, belum lagi kendala jarak Posyandu yang jauh dari tempat tinggal mereka. Usulan-usulan ini, dicatat menjadi agenda pembahasan FMS Kota Bengkulu ke depan untuk mencari solusi yang tepat.

Rangkaian kegiatan lain Peringatan 16 Hari Aktivisme, Cahaya Perempuan WCC bersama FKPAR Kota dan Forum Komunitas Perempuan Muda Bengkulu melakukan kegiatan Lomba Menulis Surat untuk Walikota & Wakil Walikota Bengkulu untuk kelompok usia 12 – 20 tahun. Tema yang diangkat yaitu Kespro Kita, Hak Kita Hidup Kita: PENUHI. ■

⌘ FKPAR SUMSEL - PEREMPUAN HARUS BERPENGETAHUAN DAN BERANI

Sejak terbentuk pada bulan April 2015 yang lalu, FKPAR Propinsi Sumatera Selatan berupaya melakukan peningkatan kapasitas bagi pengurus dan anggotanya serta melakukan kerja-kerja nyata diantaranya; semua pengurus dan anggota FKPAR SUMSEL harus berpengetahuan, bergerak untuk pemenuhan hak-hak perempuan sehingga dibutuhkan keahlian dan keberanian selain kesehatan baik secara fisik maupun psikis.

FKPAR Sumatra Selatan memiliki beberapa



Dok. WCC Palembang

program kerja yang sejalan dengan mandat FKPAR Sumatera diantaranya: melakukan pendataan kemiskinan (kesejateraan sosial), mengupayakan pendidikan (kejar paket) khususnya bagi anggota, mengupayakan identitas hukum terutama bagi anggota, terlibat dalam kegiatan-kegiatan dari tingkat desa sampai kabupaten, misalnya rapat desa, Musrenbang, dan lain-lain serta advokasi pemenuhan Kesehatan Seksual dan Reproduksi.

Saat ini, kegiatan FKPAR masih terus berlangsung selain secara reguler melakukan diskusi kritis

dan rapat-rapat, pengurus dan anggota FKPAR SUMSEL telah mendapat pelatihan dan pengetahuan, diantaranya pelatihan tentang gender, konseling feminis, paralegal dan mitigasi bencana berperspektif perempuan dan anak serta pengetahuan tentang HKSR dan hak asasi perempuan. Selain itu kegiatan pendataan masih sebatas mengidentifikasi anggota yang belum memiliki identitas hukum, pendidikan formal dan pendataan kesejahteraan sosial (penerima BPJS).

Salah satu kegiatan untuk penguatan pengurus FKPAR SUMSEL adalah dilakukannya konsultasi dan pendampingan. Bentuk kegiatan dari konsultasi dan pendampingan forum ini dilakukan melalui beberapa kali kunjungan dan diskusi kiritis dengan Direktur dan Staf Lapang WCC Palembang ke Pengurus FKPAR SUMSEL.

Dari kunjungan ini terjadi diskusi, konsultasi dan koordinasi antara Direktur WCC Palembang dengan Pengurus FKPAR SUMSEL untuk mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan program dan kondisi forum, perkembangan anggota serta permasalahan-permasalahan internal yang sedang dialami forum. Dari kegiatan ini kemudian dirancang berbagai strategi bersama untuk meningkatkan kualitas program dan forum serta mengatasi permasalahan yang sedang terjadi dengan titik tekannya bahwa kita (perempuan) harus berpengetahuan dan berani. ■

⌘ FKPAR LAMPUNG - PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN

Perubahan sistem dan praktek politik Indonesia sekarang ini dapat dicapai melalui peran serta kaum perempuan dalam memberikan suaranya (memilih) secara aktif dan cerdas pada para Calon Kepala Daerah, yakni mereka yang mempunyai kepedulian dan keterlibatan atas kehidupan perempuan di dalam PILKADA yang jujur dan adil. Satu hal yang perlu ditekankan di dalam hal ini bahwa, "Perempuan jangan lagi untuk diperjualbelikan".



Dok. DAMAR Lampung

Perempuan harus memilih dengan cerdas, yakni memilih Calon Kepala Daerah dengan cermat, memperhatikan dan mempertimbangkan latar belakang politik. Selain itu, perempuan dalam memberikan hak suara perlu secara cermat dan seksama memperhatikan asal partai politik dari para calon. Partai politik tersebut haruslah mempunyai format dan program yang peduli terhadap kehidupan kaum perempuan seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan anti kekerasan.

Berkaitan dengan hal tersebut, DAMAR merasa penting adanya suatu pendidikan politik bagi Guru Kader yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Lampung (GPL) serta melakukan dialog dengan Calon Kepala Daerah pada wilayah kerja GPL yang menyelenggarakan PILKADA, yakni di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah dan Bandar Lampung.

GPL merupakan Organisasi massa perempuan yang lahir dari grass root. Berproses sejak tahun 2001, melalui pendidikan-pendidikan kritis yang difasilitasi oleh DAMAR di berbagai wilayah pinggiran Lampung sehingga perempuan-perempuan "terdidik" yang berserak di beberapa kabupaten/kota merasakan kegelisahan yang sama untuk menyatukan diri agar memiliki kekuatan bersama. Tujuannya agar Kader GPL memahami relevansi PILKADA dengan strategi advokasi pemenuhan hak dasar perempuan, khususnya HKSR dan meningkatkan kemampuan kader untuk menyusun rencana/strategi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan yang berperspektif adil gender. Terakhir kegiatan ini untuk membangun ruang dialog dan kontrak politik dengan Calon Kepala Daerah.

Gelaran Pendidikan Politik dan Dialog bersama Calon Kepala Daerah dilakukan pada tanggal 17-18 November di Lampung Tengah, 20-21 November di Lampung Selatan, 29-30 November di Bandar Lampung serta 2-3 Desember di Lampung Tengah. ■



FORUM MULTI STAKEHOLDER

Kesepahaman Yang Terbangun untuk HKSR Perempuan

⌘ FMS KABUPATEN/KOTA BANDA ACEH, PIDIE DAN ACEH UTARA

FMS rutin dilaksanakan setiap bulan di Kota Banda Aceh dan dua bulan sekali di kabupaten Aceh Utara dan Pidie. Kegiatan ini melibatkan pemangku kebijakan di institusi Pemerintah/ SKPD terkait di masing-masing wilayah meliputi Bappeda, Dinas Kesehatan, Kantor PPKB, Rumah Sakit, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, P2TP2A, Puskesmas dan Camat dari kecamatan yang menjadi wilayah kerja Flower Aceh, serta perwakilan tokoh adat, tokoh agama, akademisi, Ornop/LSM dan media. Khusus di Banda Aceh, anggota legislatif perempuan juga terlibat aktif dalam pertemuan rutin FMS ini.

Forum ini membantu untuk membuka sekat komunikasi dan koordinasi lintas sektoral untuk mendiskusikan secara spesifik isu-isu HKSR, kendala dan upaya penanganan, sinergi program, sampai menyusun dan melakukan advokasi bersama terkait pemenuhan HKSR di masing-masing wilayah. Lebih lanjut, forum ini juga menjadi ajang untuk berbagi informasi dan belajar bersama. Seperti pernyataan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana/PPKB Kota Banda, Ir. Hj. Badrunnisa, M.Si sebagai berikut:

"Saya berharap FMS ini dapat terus berjalan, ini forum penting. Dari sini kita bisa saling mengetahui program dari masing-masing instansi sehingga bisa saling bersinergi.

Forum ini juga memudahkan kita untuk mendapatkan masukan dari masyarakat di desa, melalui tokoh-tokoh strategis yang menjadi perwakilan dari masyarakat, tentunya sangat mempermudah kita dalam menjalankan kerja-kerja di pemerintahan ".

Adapun bentuk sinergi program yang dijalankan beragam, misalnya staf Flower Aceh dimintakan untuk menjadi narasumber untuk isu Kespro dan pengobatan tradisional, kampanye bersama melalui aksi-aksi bersama mensosialisasikan isu Kespro dan HKSR, dan menyelenggarakan sosialisasi HKSR bagi kelompok perempuan di desa melalui diskusi kelompok dan sekolah formal, seperti yang telah dilakukan Flower Aceh bersama KP3A, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di Desa Blang Ara, Aceh Utara.

Forum ini juga memberikan perhatian pada beberapa isu yang menjadi fokus advokasi. FMS di Banda Aceh melakukan sosialisasi bagi kelompok perempuan tentang layanan kesehatan tanpa bayar di BPJS Kesehatan yang berkaitan dengan Kespro dan HKSR, seperti tes IVA, papsmear dan USG. Untuk proses sosialisasi tentang layanan tersebut, BPJS Aceh siap untuk memberikan sosialisasi tentang fasilitas BPJS dan isu-isu seputar kesehatan reproduksi dengan menghadirkan tenaga medis yang handal.



Dok. Flower Aceh

Selain itu, FMS di Banda Aceh juga berupaya untuk mendorong lahirnya Peraturan Walikota tentang implementasi dari Qanun Kesehatan Ibu, Balita dan Bayi Baru Lahir (KIBBLA), khususnya pada 6 pasal yang berkaitan dengan isu Kespro, dan advokasi alokasi 20% dana desa untuk kebutuhan perempuan.

Terkait Qanun KIBBLA di Banda Aceh, perwakilan dari Dinkes yang merupakan anggota FMS Kabupaten Aceh Utara tertarik untuk mendiskusikan lebih mendalam, dan berharap agar Aceh Utara juga dapat menduplikasinya untuk diterapkan di wilayah tersebut, sebagaimana dinyatakan berikut ini:

"Saya apresiasi terhadap Banda Aceh yang selalu lebih maju, bagi kami Qanun KIBBLA ini hal baik untuk kepentingan perempuan. Saya berharap kita bisa mendapatkan infomasi lebih jelas tentang qanun tersebut dan langkah-langkah yang harus dijalankan untuk menduplikasikannya di daerah kita".

Selain itu FMS di Aceh Utara dan Pidie juga fokus melakukan advokasi dana desa untuk kepentingan perempuan, khususnya untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, mengingat di dua daerah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi. Selain itu, FMS Kabupaten Aceh Utara juga rutin melakukan advokasi agar BPJS setempat juga membuka akses perempuan untuk mendapatkan layanan terkait dengan Kespro dan HKSR. ■

⌘ FMS KABUPATEN TAPANULI TENGAH – SUMATERA UTARA

FMS Kabupaten Tapanuli Tengah merayakan 16 Hari Aktivisme dengan melakukan 2 kegiatan yaitu:

1. Sosialisasi dengan tema "PP No. 61 tahun 2014 Dihubungkan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" di gereja GEPKIM di Pangambatan Kecamatan Kolang diikuti oleh 56 perempuan jemaat.
2. Sosialisasi dengan tema "Lindungi Anak Perempuan Dari Kasus Kekeresan Seksual" di TK Sofia di Kolang diikuti oleh 104 peserta. Dari kegiatan ini, orang tua belajar bagaimana berkomunikasi dengan anak secara baik, dapat mengenali perilaku anak dan mengajari anak bagaimana menghormati organ reproduksinya.

Rencana kerja FMS Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu sosialisasi dengan tema "Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi" pada tanggal 14 November 2015 di MAN Dolok Sanggul diikuti oleh 31 peserta. Peserta mendapat informasi mengenai kesehatan seksual dengan tinjauan peraturan pemerintah serta dari tinjauan Islam.



Dok. Pesada

Sosialisasi "Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi" pada tanggal 16 November 2015 di Mesjid Raya Humbahas diikuti oleh 63 Perempuan. Selain mendapat informasi mengenai kesehatan seksual dengan tinjauan peraturan pemerintah serta dari tinjauan Islam, peserta juga mendapat informasi mengenai jenis-jenis alat kontrasepsi dan efek samping penggunaannya. Pembahasan juga meliputi mengenai KDRT yang terjadi di lingkungan sekitar. ■

⌘ FMS "LANCANG KUNING" KABUPATEN LANGKAT – SUMATERA UTARA

FMS Lancang Kuning terbentuk pada bulan Mei 2015 berdasarkan hasil Lokakarya Forum Multi Stakeholder di Langkat. Terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, kelompok perempuan, dinas terkait, dan juga perwakilan remaja. Forum ini sepakat untuk fokus pada Advokasi Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi/HKSR Perempuan dan Perempuan Muda.

Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa penguatan pengetahuan terkait HKSR dengan mengadakan diskusi-diskusi di kelompok

perempuan, sekolah-sekolah, dan kelompok remaja desa, dan muda mudi gereja/masjid. Selain itu forum juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi perempuan bekerjasama dengan DINKES Kabupaten.

Pertemuan berkala dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat termasuk KUA di Tanjung Pura dalam rangka sosialisasi Kespro bagi Calon Pengantin. Serta melakukan audiensi terkait dengan advokasi pemenuhan HKSR. ■

⌘ FMS KABUPATEN NIAS – SUMATERA UTARA SEMANGAT MENGIKUTI PELATIHAN UNTUK MELAKUKAN SUATU PERUBAHAN

Pada bulan Mei 2015, PESADA Nias melakukan "Lokakarya Pembentukan Forum Multi Stakeholder" untuk para tokoh (agama, adat, pendidikan dan aparat desa) dampingan PESADA atau kelompok CU di Kabupaten Nias. Lokakarya ini di lakukan karena masih banyak terjadi masalah



Dok. Pesada

HKSR bagi anak remaja. Peserta yang mengikuti proses kegiatan ini sangat semangat dan antusias.

Sejak pengurus FMS terbentuk, beberapa pelatihan yang sudah diikuti seperti Lokakarya Bedah PP No. 61 tahun 2014, Pendalaman HKSR untuk Tokoh Agama Kristen dan Diskusi Penguatan FMS. Lalu untuk perubahan awal yang dilakukan adalah Diskusi HKSR untuk SMK Negeri 1 Hiliduho, Sosialisasi Akibat Pernikahan Dini untuk Anggota CU/PKK/Remaja Desa Awoni Lauso, serta Sosialisasi Mengenai HKSR (melalui PA, diselingi dengan mata pelajaran biologi dll). ■

⌘ FMS KABUPATEN ROKAN HILIR – RIAU

Penelitian dan analisis Permampu telah menunjukkan besarnya pengaruh para tokoh adat, agama dan terutama para penyedia layanan kesehatan, baik modern maupun tradisional dalam memenuhi HKSR perempuan. Karena itu diperlukan strategi dalam melakukan pendekatan para pihak yang diharapkan bisa bersinergi untuk melakukan advokasi bersama HKSR Perempuan. Diawali dengan pendekatan pihak per pihak mulai dari Tokoh Masyarakat, Institusi Agama, Institusi Pendidikan, dan pemerintah melalui Diskusi Kritis Berseri HKSR untuk membangun pemahaman bersama akan pentingnya HKSR Perempuan.

Hal ini sesuai dengan tujuan pembentukan FMS yang akan menjadi arena pertemuan para tokoh/lembaga berpengaruh untuk pendalaman perspektif, pengetahuan dan tukar pikiran mengenai berbagai kasus HKSR di lapang, dan membangun kelompok pendukung yang terdiri dari para tokoh berpengaruh dan yang paham mengenai perjuangan program HKSR di semua level dan sektor, maka pada tanggal 26 Agustus 2015, melalui proses yang dinamis, telah terbentuk FMS dan menyepakati Nama, Visi dan Misi dari FMS HKSR Kabupaten Rokan Hilir dan menyatakan mendukung pelaksanaan program pemenuhan HKSR Perempuan serta melaksanakan program-program kerja yang sudah disepakati.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh FMS HKSR Kabupaten Rohil antara lain mengikuti audiensi di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kesehatan.

Hal ini membuktikan konsistensi FMS untuk mendukung program HKSR. Selain itu perwakilan FMS Kabupaten Rohil juga telah mengikuti kegiatan diskusi pemuka agama Islam yang dilaksanakan oleh Flower Aceh.



Dok. PPSW Riau

Diskusi pemuka agama Islam ini bertujuan untuk membangun dukungan upaya pemenuhan HKSR perempuan untuk pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Desa Daroy Kameu, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Kesempatan mengikuti diskusi HKSR oleh pemuka agama di Aceh telah menambah wawasan dan kesadaran peserta bahwa penting untuk pemuka agama Islam terlibat untuk mendukung pemenuhan HKSR perempuan karena tidak betentangan dengan ajaran agama Islam. ■

⌘ FORUM MULTI PIHAK PEDULI HKSR KOTA PADANG – SUMATERA BARAT

Pertemuan dengan tema "Review Kebijakan dan Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak di Kota Padang" menyepakati bahwa forum harus segera melakukan audiensi ke Komisi IV, mengingat DPRD Kota Padang akan melakukan penyusunan dan pengesahan anggaran kegiatan masing-masing SKPD untuk tahun 2016.



Dok. LP2M

Audiensi bertujuan menyampaikan aspirasi forum agar DPRD mendukung pengalokasian anggaran untuk pemenuhan dan perlindungan HKSR di Kota Padang serta menganggarkan dana untuk kegiatan Forum Anak sebagai salah satu indikator dalam mewujudkan Kota Layak Anak bagi Kota Padang. Selain itu Forum juga mendesak pembuatan Peraturan Wali Kota sebagai upaya memperkuat implementasi Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak.

Melinda Rose dari Komisi IV DPRD Kota Padang yang juga merupakan anggota Forum Multi Pihak Kota Padang meminta agar LP2M bersama dengan forum agar selalu berkomunikasi dengan DPRD tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Serta Komisi IV DPRD Kota Padang akan mendorong Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana/ BPMKB sebagai *leading sector* agar segera merancang dan mengajukan Draft Perwako Pembinaan & Perlindungan Anak diawal Tahun 2016. ■

⌘ FMS HKSR KABUPATEN MERANGIN JAMBI

Paska pembentukan forum pada tanggal 09 Juni 2015, FMS Kabupaten Merangin mengadakan pertemuan dan diskusi secara berkala bertempat di ruang Pola II Kantor Bupati pada tanggal 29 Desember 2015.

Dalam pertemuan yang kedua ini dihadiri dari berbagai unsur yaitu Bupati Merangin, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Merangin, BPPKB & PA, Perwakilan Forum Tokoh Adat, Perwakilan Forum Tokoh Agama, Perwakilan Forum Suami Pendukung HKSR, Perwakilan Kepala Sekolah, Perwakilan Guru BK, Perwakilan FKPAR Merangin, UPPA Polres Merangin, Kasad Binmas Polres Merangin, Kabid. Pelayanan RSUD Kolonel Abunjani Bangko, Kasi Pemerintah BPMPD, Ketua IBI Merangin, dan media.

Kepala BPPKB & PA Kabupaten Merangin yang diwakili bapak Suhelmi selaku Kabid. Kesehatan Reproduksi mengatakan, *"Bahwa selama ini APM telah membangun sinergi dengan BPPKB & PA dalam program gender dan pendampingan kasus KTP. Kami sangat berterima kasih karena telah dibantu hingga program kami bisa sampai ke tingkat*



Dok. APM

paling bawah. DINKES Kabupaten Merangin juga sangat merespon kondisi kebutuhan dasar karena sangat mendorong berkurangnya AKI dan AKB. Kami memberikan apresiasi kepada APM yang telah memprakarsai adanya forum ini. Kami mohon dukungan bapak Bupati dengan adanya program ini untuk membangkitkan pemenuhan program HKSR di Kabupaten Merangin".

Bupati Merangin Drs. H. Al Haris dalam pertemuan forum berpendapat, keberadaan APM dan FMS di Kabupaten Merangin ini sangatlah penting karena telah membantu program pemerintah. Proses penanganan AKI dan AKB masih lemah. Tahun ini terjadi 13 kasus, menurut data yang ada, dikarenakan selama kehamilan kurang pantauan dan tenaga kesehatan yang masih minim. Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin menyekolahkan 40 orang Calon Bidan dan tahun depan sudah tamat. Harapannya, Bidan-bidan tersebut ditempatkan di daerah asalnya. Selain itu ada Program Rumah Sehat dan Mobil Kesehatan keliling ke rumah-rumah warga memantau ibu-ibu hamil. Jadi tujuannya pelayan kesehatan yang mendatangi masyarakat bukan masyarakat yang mendatangi pelayan kesehatan.

Dalam pertemuan ini forum mulai melakukan identifikasi persoalan HKSR di Kabupaten Merangin antara lain; Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Merangin berada di urutan nomor dua se-wilayah Jambi (13 dari 58 kasus di Jambi) dikarenakan selama kehamilan kurang pantauan, tenaga kesehatan yang masih minim, ketersediaan fasilitas kesehatan yang belum memadai, dan minimnya Dokter Spesialis Kandungan (hanya 1 orang di Kabupaten Merangin). Untuk itu, perlu kerjasama saling koordinasi, saling berbagi dan komitmen dari semua pihak untuk menurunkan angka AKI dan AKB di Kabupaten Merangin melalui Kemitraan di FMS. ■

⌘ FMS HKSR KABUPATEN REJANG LEBONG & KOTA BENGKULU

Forum Multi Stakeholder/FMS yang sudah dibentuk di Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu pada April 2015 telah melakukan pertemuan periodik 6 bulanan. Forum ini dibentuk untuk memperkuat program kepemimpinan perempuan untuk mencapai kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi di daerah dampingan Cahaya Perempuan WCC baik di kabupaten Rejang Lebong maupun di Kota Bengkulu. Sampai Desember 2015, sudah ada beberapa kesepakatan yang ditindaklanjuti oleh FMS di kedua wilayah program HKSR tersebut.

Pertemuan FMS Kabupaten Rejang Lebong mulai difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Rejang Lebong. Dinas Kesehatan sendiri telah mengusulkan anggaran program pelayanan Kesehatan Reproduksi pada APBD tahun 2016. Untuk pelayanan visum di RSUD Curup, terutama untuk kasus kekerasan terhadap perempuan/kekerasan seksual bagi perempuan dari keluarga miskin akan diberikan dispensasi dan dapat menggunakan BPJS.



Dok. Cahaya Perempuan WCC

Selain itu, sudah ada di Rumah Sakit dan satu Puskesmas yang membuka Poli PMS & HIV, hanya saja jarang dikunjungi masyarakat karena sosialisasi dari Dinas Kesehatan yang masih kurang. Dalam upaya pencapaian standar pelayanan minimum kesehatan, Dinas Kesehatan Rejang Lebong melalui RSUD Curup terus meningkatkan pelayanan untuk ibu dan anak berupa penambahan fasilitas ruang rawat dan meningkatkan kinerja para dokter.

Di sisi lain, BMA Kabupaten Rejang Lebong telah mendata aturan-aturan adat dalam bentuk tulisan, bekerjasama dengan 15 Tokoh Adat lainnya. Kedepan harapannya, aturan-aturan ini akan didokumentasikan dalam bentuk tulisan sehingga dapat menjadi pedoman untuk melindungi hak-hak perempuan di Kabupaten Rejang Lebong.

FMS Kabupaten Rejang Lebong telah mengupayakan usulan anggaran untuk penyelenggaraan PERDA tentang Perencanaan Dalam Bidang Bantuan Hukum untuk Orang Miskin dan PERDA tentang Pencegahan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Usulan anggaran sedang menunggu persetujuan DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

Sementara itu, pertemuan FMS Kota Bengkulu difasilitasi oleh Wakil Walikota Bengkulu selama ini. Pertemuan membahas dan menyepakati untuk mendorong keluarnya Peraturan Walikota tentang Pendidikan Kesehatan Reproduksi sebagai landasan dalam implementasi PERDA No. 20 Tahun 2014 tentang Pendidikan di Kota Bengkulu (khususnya pasal 12 tentang siswi/pelajar yang mengalami KTD dapat melanjutkan pendidikan formal di sekolah yang sama). ■

⌘ PEMBENTUKAN FMS KABUPATEN OKI – SUMATERA SELATAN

Pembentukan FMS di Kabupaten OKI baru bisa dilakukan pada pertengahan Bulan November 2015 karena beberapa kali mengalami penundaan akibat pekatnya kabut asap.

Pembentukan FMS ini dimaksudkan untuk membangun kelompok pendukung yang terdiri dari para tokoh berpengaruh dan perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di kabupaten OKI, dalam rangka menggalang solidaritas untuk menangani secara bersama permasalahan HKSR di Kabupaten OKI dan sebagai arena pertemuan untuk pendalaman perspektif, pengetahuan, mengenali hambatan dan bertukar pikiran mengenai berbagai kasus dan pemenuhan HKSR Perempuan.

Pada workshop pembentukan dibahas persoalan



Dok. WCC Palembang

dan berbagai kasus HKSR di lapangan, khususnya yang terjadi di Kabupaten OKI. Pemerintah Daerah kabupaten OKI melalui Kepala Dinas Kesehatan menyatakan sangat mendukung upaya pemenuhan HKSR di kabupaten OKI. Dan bersama dengan WCC Palembang serta FMS yang sudah terbentuk akan mengkampanyekan dan bertukar pikiran mengenai berbagai isu dan kasus HKSR.

Beberapa rencana yang disepakati forum adalah perlu peningkatan kapasitas anggota forum berupa pelatihan-pelatihan terutama terkait HKSR (pengetahuan dan ketrampilan advokasi), pertemuan reguler dan audiensi ke Bupati OKI. ■

⌘ RANGKAIAN DISKUSI FMS DI KABUPATEN/KOTA DI LAMPUNG

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan jaminan terhadap akses kaum perempuan. Faktanya, partisipasi warga khususnya perempuan hanya mungkin terjadi kalau mereka berkesadaran dan terorganisir. Karena itu, perlu upaya untuk mendorong kaum perempuan di desa untuk berorganisasi dan berpolitik. Selain itu, perlu kepastian agar UU Desa termasuk anggaran yang dialokasikan, benar-benar diarahkan untuk kemajuan rakyat di desa termasuk perempuan. Untuk itu, DAMAR berinisiatif mengadakan FGD khusus membahas Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014.

Diskusi Kritis dengan tema "Kesiapan Pemerintahan Kabupaten dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender" pertama diadakan di Kabupaten Tanggamus Pada 21 September 2015.

Hasilnya terkait pemberdayaan harus ada intervensi di dalamnya. Harus mencari metode untuk keterlibatan perempuan dan pemberdayaan. Berbicara pemberdayaan, ada intervensi negara di dalamnya. Negara harus mencari strategi untuk agar perempuan mau terlibat aktif dalam proses pembangunan. Terkait persoalan prioritas anggaran, biarkan warga yang menentukan sendiri, karena hanya warga yang tahu kebutuhan-kebutuhan mereka.

Nantinya semua pihak dapat memantau pelaksanaan dari UU Desa yang merupakan salah satu bagian terkecil dari pemenuhan HKSR, karena di dalamnya terdapat anggaran yang responsif gender. Untuk mensukseskan pelaksanaan UU Desa dibutuhkan partisipasi bersama. Artinya kaum perempuan harus dilibatkan. Ada dua Pekerjaan Rumah yaitu *pertama* tugas Fakta Tanggamus selaku organisasi perempuan di Tanggamus, harus mengkader perempuan-perempuan potensial yang akan terlibat dalam pemerintahan pekon. *Kedua,* untuk Dinas Pendidikan agar diadakan kejar paket khususnya bagi perempuan desa yang hanya tamat SD, SMP dan SMA.



Dok. DAMAR Lampung

Fakta Tanggamus dan perempuan desa siap untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Khusus untuk bagian hukum, Fakta telah menyampaikan Draft Peraturan Pekon kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan DPRD. Harapannya dapat ditindaklanjuti untuk dijadikan Perda, sehingga kaum perempuan tidak harus meminta keterwakilan perempuan yang sekurang-kurangnya 30% di BHP dan LPM.

Pada 22 September 2015 dilakukan di Kabupaten Lampung Timur. Sebagai posisi strategis dalam pemenuhan HKSR, aparat desa dapat mendorong perempuan untuk lebih berpikir kritis dan memenuhi hak tersebut. Kebanyakan alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tanpa memperhatikan kebutuhan perempuan.

Peningkatan kapasitas SDM khususnya perempuan bukan hanya di dalam perempuan itu sendiri, akses untuk perempuan harus dibuka. Terkait RPJM Des dan RKP Des, masyarakat sendiri yang bisa menyusun daftar yang dibutuhkan dengan melihat potensi desa. Jika setiap dusun diberi ruang untuk mengembangkan potensi, hal ini bisa dibawa ke Musrenbang untuk pembangunan desa. Terkait UU Desa harapannya ada kesamaan visi dan tujuan antara pemerintah tingkat dusun, kab/kota dan tingkat propinsi. Secara prinsip DAMAR siap membantu pendampingan terkait perencanaan anggaran desa yang responsif gender.

Pada 30 September 2015 di Kabupaten Lampung Utara. Perlu keterlibatan secara aktif dari perempuannya sendiri, sehingga kebutuhan-kebutuhan perempuan dapat diketahui dan dapat dianggarkan. Anggaran yang diturunkan 1,3 M - 1,5 M per desa, yang semuanya tergantung dari kesiapan desa itu sendiri. Musrenbangdes hanya diikuti oleh beberapa kelompok, dan aspirasi yang keluar bukan aspirasi dari masyarakat. Skala prioritas dalam pembangunan desa tidak hanya fisik, tapi juga pemberdayaan.

Terkait PERDES, tidak semua desa mampu membuatnya, padahal PERDES penting terkait dengan kekayaan desa. Sehingga perencanaan penganggaran akan jelas. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah orang-orang yang dapat membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan lembaga-lembaga yang hadir dapat ikut menyiapkan kader-kader untuk membantu aparat desa dalam penganggaran dan penggunaan dana desa. Serta perlunya berdiskusi dengan aparat desa terkait penggunaan dana desa untuk pembangunan desa. ■



Pendidikan KSR Untuk Semua



Murita lahir tanggal 30 Agustus tahun 1985 di Kota Banda Aceh. Kegiatan keseharian menjadi tenaga pendidik untuk pengajian anak di Meunasah Desa Alue Dayah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. Baginya mengajar anak-anak adalah hal yang menyenangkan, karena ia percaya, mereka adalah generasi kedepan yang akan menentukan masa depan Aceh agar lebih maju.

Murita mulai bergabung dan terlibat aktif pada rangkaian aktivitas Flower Aceh pada awal tahun 2015, ketika proses identifikasi anggota kelompok untuk kebutuhan pelaksanaan program MAMPU di Banda Aceh.

Dalam pengakuannya Murita menyebutkan bahwa keikutsertaannya di kelompok dampingan Flower Aceh selama satu tahun ini memberikan banyak dampak positif kepada dirinya dan orang lain.

Dalam berbagai kesempatan, Murita mengakui bahwa pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang didapatkannya, sangat membantu dia untuk paham mengenai pemasalahan kesehatan. Murita juga tergerak untuk berbagi pengetahuan tersebut kepada masyarakat di sekitar dia tinggal, tidak hanya kepada remaja dan kelompok dewasa, bahkan ia pun mulai menyisipkan pemahaman tentang isu Kesehatan Seksual dan Reproduksi/KSR melalui pengajian anak yang dikelolanya.

Pemahaman tentang Isu Kesehatan Seksual & Reproduksi yang diberikan kepada anak, kelompok remaja dan kelompok perempuan dewasa disesuaikan dengan dengan kultur masyarakat Aceh, supaya mendapatkan dukungan dari orang tua dan masyarakat setempat.

Untuk kelompok remaja, Murita melakukan transformasi pemahaman tentang KSR dan HKSR melalui diskusi informal, pertemuan dan rapat desa, obrolan ringan secara personal. Dengan kelompok remaja dan anak layaknya seorang Konselor, serta melalui ceramah keagamaan yang disampaikannya melalui forum majelis taklim yang diikutinya.

> *Pemahaman tentang Isu Kespro disesuaikan dengan dengan kultur masyarakat Aceh, agar mendapatkan dukungan masyarakat setempat.*

Posisinya yang dipercaya masyarakat sebagai Tokoh Agama gampong sangat membantu proses penyadaran dan pembelajaran bersama terkait isu KSR di desanya. Apalagi keberadaannya mendapat dukungan penuh dari aparatur gampong setempat.

Pada tingkat kebijakan desa, Murita bersama anggota kelompok dampingan Flower Aceh di desa tersebut secara intens melakukan pengawalan perencanaan dan penganggaran di tingkat desa agar mengakomodir kebutuhan perempuan. Upaya ini dilakukan melalui penyampaian masukan dan usulan pada rapat-rapat perencanaan di desa.

Upaya lainnya dilakukan melalui peran dan fungsinya sebagai Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)-PNPM, wakil Ketua Majelis Taklim dan Paralegal untuk Desa Alue Daya Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

Sebagai paralegal dan tokoh agama di desa, ia selalu melakukan pendampingan bimbingan agama, dan bahkan menjadi rujukan masyarakat di desa untuk berkonsultasi tentang agama dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di komunitas.

Murita

Usia
30 Tahun

Tanggal cerita ditulis
19 Desember 2015

Lokasi
Desa Alue Dayah Teungoh, Kec. Meuraxa - Banda Aceh

Baginya, terlibat sebagai anggota kelompok Flower Aceh dalam program MAMPU di Banda Aceh dirasakan sangat membantu tugas dan fungsi sosial dia di masyarakat, seperti pernyataannya berikut: *"Flower Aceh banyak kali mendukung kerja-kerja saya, banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapat, sehingga bisa juga saya bagikan ke orang lain di sekitar saya. Berharap supaya proses belajar bersama ini dapat terus berlanjut, sehingga lebih banyak lagi manfaat yang bisa didapat oleh semua pihak untuk mendukung pemenuhan HKSR dan pembangunan desa yang sesuai harapan perempuan di sini ".* ■ **(Riswati, Manajer Program Flower Aceh)**

Perjuangan Seorang Perempuan Korban Kekerasan



Marta Pasaribu adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 7 orang anak. Dia adalah penyintas yang bangkit dari korban KDRT.

Marta menikah dengan suaminya selama lebih dari 20 tahun, namun kerap mendapatkan kekerasan psikis sepanjang perkawinan mereka. Bahkan anak mereka kerap menjadi korban kekerasan fisik oleh suaminya yang pemabuk dan tidak mau menafkahi keluarga.

Tidak hanya itu, pada tahun 2012 Marta dan anak perempuannya menjadi korban penganiayaan dari tetangganya. Belum selesai kasus ini, Marta kemudian menerima berita bahwa anak perempuannya yang lain mendapat kekerasan seksual dari tetangganya.

Saat itulah Marta bertemu dengan WCC Sinceritas PESADA. Ia belajar melihat benang merah dari masalah yang dihadapinya, belajar mengenai haknya sebagai perempuan, belajar mengenai posisi perempuan di masyarakat hingga akhirnya dia bangkit.

> *Aku harus melawan, melompati budaya yang telah mengukungku selama 20 tahun.*

Marta memilih keluar dari rumah suaminya, meskipun tindakannya ini banyak dicemooh oleh masyarakat sekitar yang merasa Marta melanggar adat dan budaya setempat. Marta tidak peduli. Ia merasa adat istiadat hanya diam dan tidak bertindak membantu saat dirinya mendapat kekerasan. *"Aku harus melawan, melompati budaya yang telah mengukungku selama 20 tahun"*.

Marta keluar dari rumah suaminya dan pindah ke rumah orang tuanya. Atas bantuan anak perempuannya, Ia membangun rumah papan untuk tempat tinggal dirinya dan seluruh anaknya. Hidup pas-pasan tidak membuat perempuan ini menyerah. Bahkan menjadi buruh di ladang orang lain pun dilakoni.

Marta menjadi pelopor bagi perempuan lain untuk bangkit, Ia membentuk kelompok CU yang di damping oleh PESADA di dusun tempatnya. Pengetahuannya mengenai hukum sedikit demi sedikit dipakainya untuk menjelaskan posisi dan hak perempuan di dusunnya. Beberapa pertemuan yang diikutinya membuat Marta belajar pentingnya berorganisasi serta bertemu dengan perempuan dari kabupaten lain.

Dasar pengetahuan mengenai Kesehatan Seksual dan Reproduksi, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak membuatnya lebih percaya diri dan mandiri. Marta berubah menjadi perempuan yang terbiasa mengatur waktu dan keuangannya. Ia juga sangat senang karena saat ini punya tabungan di CU.

Marta juga menerapkan pembagian peran di rumah, tidak membedakan pekerjaan yang harus dilakukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki harus juga bisa mencuci piring, memasak dan mengasuh adik, demikian juga anak perempuan. ■ **(Dewi Hairani, Supervisor Wilayah Humbang Hasundutan & Tapanuli Tengah PESADA)**

Marta Pasaribu

Usia
46 Tahun
Tanggal cerita ditulis
9 Desember 2015
Lokasi
Dusun Lumban Julu, Kec. Dolok Sanggul, Kab. Hambang Hasundutan, Sumatra Utara

Tokoh Agama Perempuan dari Desa Pulau Tujuh

Ibu Mu'amanah, yang akrab dipanggil dengan Ibu Muk, adalah seorang perempuan yang menjadi Tokoh Agama Desa Pulau Tujuh Kec.Pamenang Barat- Merangin. Dia adalah seorang pendidik di TK Aisyiah Bustanul Athfal (ABA) dan juga aktif memberikan pengajian pada anak-anak di TPA dan tausyiah dikelompok pengajian ibu-ibu.

Istilah HKSR (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi) pertama didengarnya pada saat ibu Muk mengikuti acara FGD Pelibatan Tokoh Agama dalam Pemenuhan HKSR yang diadakan oleh Aliansi Perempuan Merangin di desa Tambang Emas. Mendengar judulnya di spanduk saja ibu Muk sudah menyimpulkan hal yang negatif. *"Iihhh...! Masak para Tokoh Agama akan diajak berdiskusi hal yang porno – porno"*, pikirnya saat itu. Namun setelah mengikuti diskusi dan mendengarkan paparan dari APM, faktanya sangat jauh dari apa yang dibayangkan semula. Ternyata banyak pengetahuan penting yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi yang selama ini tidak diketahui ibu Muk. Di tempatnya mengajar, ibu Muk mengalami kesulitan ketika menghadapi anak didiknya yang masih anak – anak sudah membicarakan masalah pacaran dan menyukai lawan jenisnya. Dia tidak tahu bagaimana cara memberikan pengertian kepada anak didiknya yang masih kecil maupun mendiskusikan kepada para orang tuanya.



"Banyak pengetahuan baru yang saya peroleh, diantaranya pendidikan seks haruslah diberikan sejak usia sedini mungkin, baik di keluarga maupun di taman bermain seperti tempat saya mengajar. Hanya saja perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Kalau anak masih duduk di bangku TK, kita kenalkan dengan alat kelamin kita dan bagaimana cara menjaganya. Misalnya anak – anak harus memakai celana, kalau buang air kecil dilakukan di kamar mandi dan cebok setelahnya. Alat kelamin tidak boleh dipegang oleh orang lain selain dokter dan ibunya. Dan pengetahuan ini sekarang sudah mulai saya terapkan di sekolah TK tempat saya mengajar"

Dulu ibu Muk juga sependapat dengan para Tokoh Agama pada umumnya, jika perempuan akan melahirkan sebaiknya ditolong oleh dokter perempuan. Haram hukumnya jika alat kelamin seseorang dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya. Masih segar ingatan ibu Muk dengan cerita yang dibagikan oleh Tokoh Agama lain dalam sebuah diskusi di APM, yang menceritakan bahwa dia memiliki saudara yang akan melahirkan dan memerlukan penanganan dokter. Sementara dokter perempuan tidak tersedia, yang ada hanya dokter laki – laki.

Karena masih berpegang pada prinsip yang diyakininya, bahwa tidak boleh saudaranya itu ditolong oleh dokter laki – laki, maka apa yang terjadi ? Saudara Tokoh Agama tadi meninggal dunia karena mengalami pendarahan hebat dan terlambat mendapat pertolongan. Kisah nyata ini benar-benar telah merubah pemikiran ibu Muk tentang pandangan haram jika persalinan ditangani oleh dokter laki-laki. Ternyata pandangan ini telah membawa kematian dan lagi-lagi perempuanlah yang menjadi korbannya. Sebab itu, ibu Muk sangat mendukung program HKSR ini agar pengalaman pahit seperti ini tidak terjadi lagi.

> *Di kelompok pengajian saya juga memberikan informasi dan mengajak ibu-ibu untuk berdiskusi masalah HKSR ini.*

Mu'amanah

Usia
57 Tahun
Tanggal cerita ditulis
10 Desember 2015
Lokasi
Desa Pulau Tujuh, Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin, Jambi

"Di kelompok pengajian, saya juga memberikan informasi HKSR, dengan mengajak ibu-ibu untuk berdiskusi masalah HKSR ini di sangar CC Sehat Mandiri. Selain pengetahuan tentang kesehatan, kami juga jadi tahu tentang hak-hak reproduksi yang benar".

Harapan ibu Muk adalah dapat berbagi pengetahuan yang diperoleh dari APM kepada lebih banyak kelompok ibu-ibu pengajian. Ada diskusi dan sinergi antara APM dan kelompok- kelompok pengajian untuk membangun kebersaman, sehingga ibu-ibu yang awam dengan informasi HKSR ini akan lebih memahami. Selain itu, APM hendaknya juga melibatkan para remaja masjid, dengan membuat kegiatan yang positif agar menjadi anak yang bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, bangsa dan agama. ■ **(Sutiyem, Staf Lapang APM Jambi)**

Liputan Media PERMAMPU

⌘ 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Flower Aceh mengadakan sebuah seminar pada tanggal 02 Desember 2015 dengan tema "Perempuan dan Kesehatan: Berjuang dalam Lingkar dan Diskriminasi".
Selengkapnya klik di sini:
http://floweraceh.or.id/event/seminar-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan/

⌘ Kemiskinan Berwajah Banyak

Kemiskinan merupakan masalah berwajah banyak. Bukan hanya diukur dari sisi ekonomi (seperti yang dilakukan oleh negara yang secara umum mengukur kemiskinan dari sisi pendapatan dan pengeluaran atau konsumsi) kenyataan menunjukan bahwa kemiskinan juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang atau dalam hal ini perempuan.
Selengkapnya klik di sini:
http://fokusaceh.com/index.php/2015/10/20/perempuan-melawan-kemiskinan/

⌘ Forum Komunitas Perempuan Muda Sumatera (FKPMS)



Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Seksual Sedunia (HKSS), Konsorsium PERMAMPU mengadakan Forum Komunitas Perempuan Muda Sumatera (FKPMS) di Balai BPPNFI Regional I Medan, pada tanggal 04 – 07 September 2015. Melalui forum ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran perempuan muda bahwa mereka memiliki kekuatan kolektif untuk melakukan perubahan di dalam dirinya dan kelompok sekitarnya untuk memperoleh dan menikmati HKSR.
Selengkapnya klik di sini:
http://www.pojoksamber.com/fkpms-desak-pemenuhan-dan-perlindungan-hak-kesehatan-seksual/

⌘ Keuangan untuk Lansia

PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) menginisiasi program pendidikan keuangan bagi perempuan miskin, rentan miskin, dari marjinal yang berusia di atas 40 tahun dengan tujuan mempersiapkan perempuan-perempuan tersebut agar lebih mandiri, sehat, dan sejahtera.
Selengkapnya klik di sini:
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/613988-alasan-pentingnya-pendidikan-keuangan-untuk-lansia/2

⌘ FGD Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Aliansi Perempuan Merangin (APM) Jambi mengadakan FGD (Fokus Grup Diskusi) yang bertema "Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi" dengan melibatkan penyuluh agama dari Kementrian Agama.
Selengkapnya klik di sini:
http://jambi.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=263560

⌘ Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Bengkulu

Cahaya Perempuan WCC mencatat bahwa terdapat 46 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terhitung sejak Januari hingga Juni 2015.
Selengkapnya klik di sini:
http://news.okezone.com/read/2015/10/19/340/1234188/kasus-kekerasan-terhadap-istri-mendominasi-di-bengkulu

⌘ Laki-laki dalam Program HKSR

Cahaya Perempuan WCC ikut berpartisipasi dalam kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan mengajak semakin banyak laki-laki untuk berpartisipasi dalam isu kesetaraan gender.
Selengkapnya klik di sini:
http://syaldi.web.id/2015/08/laki-laki-di-indonesia-kondisi-terkini-tantangan-dan-harapan/

⌘ Perlindungan bagi Pelajar dan Mahasiswa

Pelajar dan mahasiswa perempuan salah satu kelompok yang rentan menjadi korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Hal ini disimpulkan dari evaluasi kasus yang ditangani oleh WCC Palembang beberapa tahun terakhir. Melihat kondisi tersebut, lembaga ini mulai gencar membangun kesadaran para pelajar dan mahasiswa melalui kegiatan kampanye "Stop Kekerasan dan Pelecehan Seksual" ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.
Selengkapnya klik di sini:
http://www.jurnalsumatra.com/2015/08/wcc-palembang-pelajar-perempuan-rentan-tindak-kekerasan/

⌘ Modul Training Gender Untuk Stakeholder

Dalam melakukan pendekatan kepada multi-stakeholder (masyarakat, lembaga adat, lembaga agama, dan pemerintah), diperlukan suatu pemahaman yang sama terhadap isu yang akan diusung. Karena itu, Lembaga Advokasi Perempuan Damar mengadakan Workshop Penyusunan Alur dan Materi Training Tentang Gender dan HKSR Untuk Stakeholder, selama 3 hari, 15-17 Agustus 2015, di Griya Inayah, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 117 Pengajaran, Bandar Lampung.
Selengkapnya klik di sini:
http://www.pojoksamber.com/damar-gelar-workshop-training-gender-hksr/

⌘ Kurikulum Pendidikan Seks Untuk Pelajar

WCC Palembang berencana untuk merekomendasikan kurikulum pendidikan seks untuk pelajar kepada Dinas Pendidikan Kota Palembang. Hal disebabkan karena data dari WCC menunjukkan banyak pelajar tingkat SMP dan SMA mengalami kekerasan seksual.
Selengkapnya klik di sini:
http://palembang.radiosmartfm.com/jurnal-palembang/3039-wcc-ajukan-kurikulum-pendidikan-seks-untuk-pelajar.html



⌘ Panen Perdana Padi Sawah Organik

Kelompok Kebun Keluarga CU Unit Rimni Tahi Jambur Indonesia bersama dengan Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) melakukan panen perdana padi sawah organik EMAS (Enak, Mudah, Aman, dan Sehat) di Desa Jambur Kec. Siempat Nempu Hilir pada tanggal 24 Agustus 2015.
Selengkapnya klik di sini:
http://www.dairikab.go.id/berita/927/panen-perdana-padi-sawah-organik.html

⌘ Bijak dalam Memilih Walikota

Calon Walikota Medan nomor urut 2, Drs. Ramadhan Pohan MIS menegaskan bahwa Walikota Medan harus bisa menjadi juru kampanye terhadap perlindungan anak-anak dan perempuan dalam anti kekerasan. Dialog masyarakat dengan calon Walikota ini terselenggara atas kerjasama aktivis perempuan SUMUT dan Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) dalam menyongsong Pilkada 09 Desember 2015
Selengkapnya klik di sini:
http://waspada.co.id/medan/wali-kota-mendatang-harus-peduli-dengan-perempuan-dan-anak/

Sustriana Saragih,
Asisten Tim Kerja Permampu

WILAYAH CAKUPAN PROGRAM PERMAMPU



Sekretariat PERMAMPU
Jl.Letjen. Jamin Ginting KM 8 No.282 Padang Bulan, Medan 20141 - Sumatera Utara
Telp/Fax. 061-8361102 | e-mail: konsorsiumpermampu@gmail.com
www.permampu.org | Facebook: PermampuConsortium